



**PEMERINTAH
KABUPATEN
JOMBANG**

BAKESBANGPOL

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

**JL. Urip Sumoharjo No. 47 Jombang
Telp (0321) 863448
Email : kesbangpol@jombangkab.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus dapat bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Atas kasih sayang-Nya pula kami dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, yaitu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan atau panduan kerja selama 3 (tiga) Tahun kedepan, yakni Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ini berisikan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan akan diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jombang, 04 April 2023
KEPALA BAKESBANGPOL

Drs. ANWAR, M.KP
Pemuda Utama Muda
NIP. 19710418 199201 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR TABEL.....IV

LAMPIRAN..... V

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan2

1.3 Maksud dan Tujuan3

 a. Maksud3

 b. Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... 6

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Bakesbangpol Kabupaten Jombang6

 a. Tugas pokok dan fungsi.....6

 b. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Jombang.7

2.2 Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Jombang..... 14

 a. Kepegawaian..... 14

 b. Sarana dan Prasarana 17

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....21

 a. Hasil Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan banga dan Politik.....21

 b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 44

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 68

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG..... 71

3.1. Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....71

3.2. Penentuan Isu strategis72

BAB IV TUJUAN DAN SASARSAN 73

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik73

4.2 Cascading Kinerja 74

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 90

5.1 Strategi.....90

5.2	Kebijakan	91
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		95
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		110
BAB VIII PENUTUP		111

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Pegawai Bakesbangpol Kabupaten Jombang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 14

2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan pendidikan..... 15

2.3 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan 16

2.4 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan 16

2.5 Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KIB A 17

2.6 Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik KIB B,C,D 18

2.7 Kartu Inventaris Barang Peralatan dan mesin20

2.8 Hasil Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan banga dan Politik.....22

2.9 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang45

3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 71

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 73

4.2 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 75

5.1 Sasaran, Indikator sasaran dan strategi 90

5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 92

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang Tahun 2024-2026 101

7.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 110

LAMPIRAN

- ✓ Tabel matrik renstra Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang – undang tersebut diamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang disusun mendasarai adanya Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, diperlukan penyusunan rencana startagis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Adapun fungsi dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yaitu merupakan kerangka dasar perencanaan untuk mengembangkan strategi dan memberikan arahan dan tujuan organisasi di masa depan dengan optimalisasi peran sumber daya Organisasi serta memudahkan melakukan kontrol terhadap semua program dan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Dengan adanya Renstra tersebut, maka setiap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang memiliki panduan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsi yang diemban serta merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja. terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola.

Dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup organisasi merupakan penjabaran dari

Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu 3 (tiga) tahun Tahun 2024-2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Adapun Pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573); Undang – Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.
13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah kabupaten jombang tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPD

b.Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 yaitu :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Bakesbangpol ;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Bakesbangpol .

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jombang 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4 Kelompok Sasaran layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.2 Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAKAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Bakesbangpol Kabupaten Jombang

a. Tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan , sususnan Organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang :

Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.”

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Jombang.

Dukungan aparatur adalah salah satu dari aspek manajemen yang penting dalam organisasi, dalam kaitan dengan fungsi manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring. Setiap fungsi akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang handal. Agar pengelolaan potensi sumberdaya aparatur bisa optimal dan seimbang maka perlu dibentuk struktur organisasi yang akan membagi potensi sumberdaya aparatur sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jombang.

Adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Sekretaris berkoordinasi dengan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya , Agama berkoordinasi dengan :
 - a. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berkoordinasi dengan :
 - a. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, berkoordinasi dengan :
 - a. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 94 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;

- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Badan;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;

- Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan

- kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/

- pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang

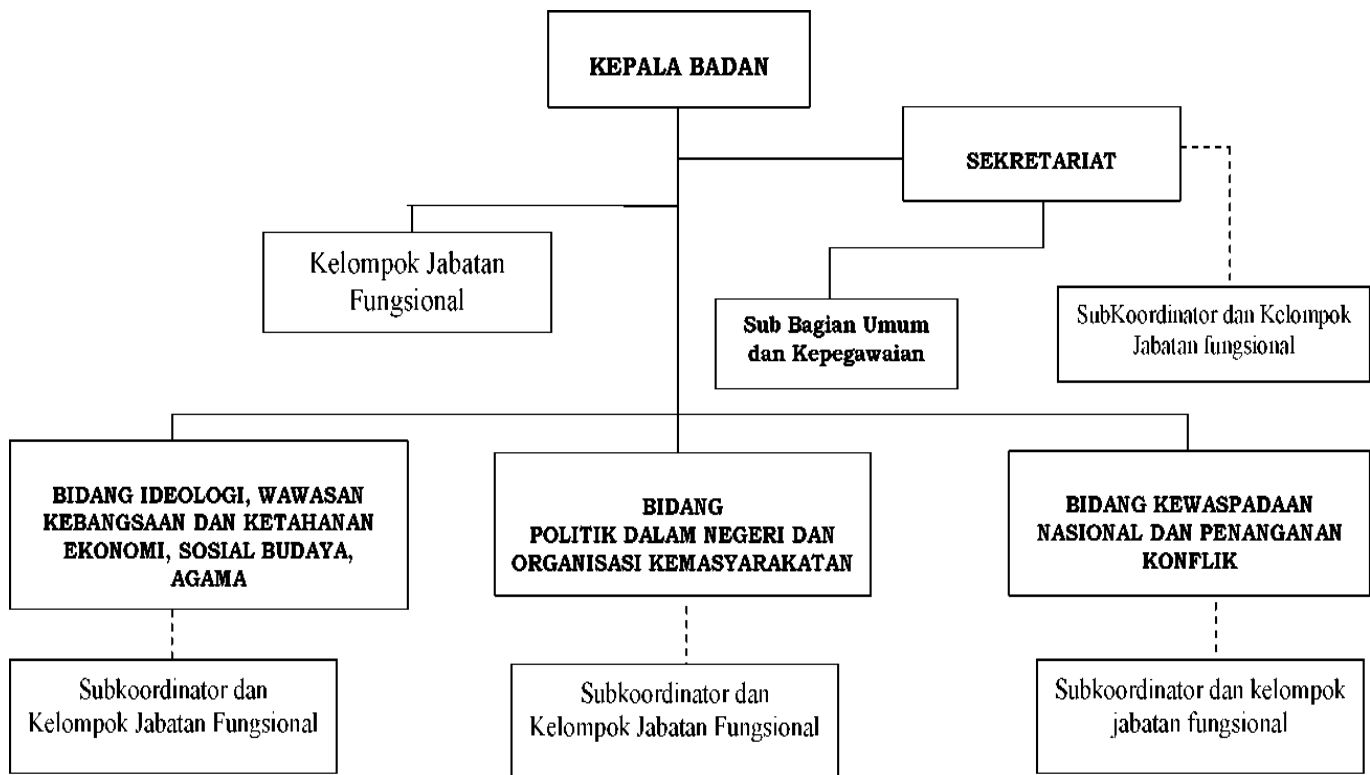
kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud), Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidangnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan



GAMBAR II. 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas pokok dan fungsi telah dijabarkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara fungsi cukup mampu mendukung capaian tujuan , sasaran RPD maupun tujuan dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

2.2 Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Jombang

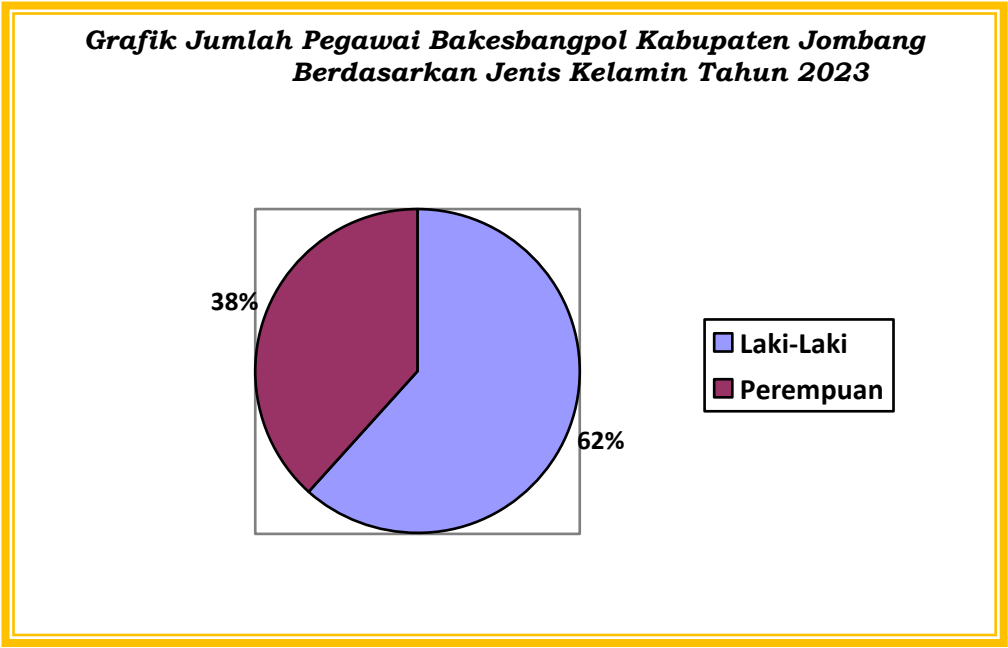
a. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang adalah 26 orang, yang terdiri dari 20 orang ASN dan 6 oarang tenaga kontrak, dengan klasifikasi berdasarkan kepangkatan dan jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bakesbangpol Kabupaten Jombang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

		Jumlah
1	Laki-Laki	16 orang
2.	Perempuan	10 orang
Total		26 Orang

Sumber : SIAP ASN tahun 2023



Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan pendidikan

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									
		S2	S1	D3	D-II	D-1	SLTA	SMP	SD	Jumlah	%
1	IV/b	2									10.00
2	IV/a	2									10.00
3	III/d		8								40.00
4	III/c		2								10.00
5	III/b		2								10.00
6	III/a		1								5.00
7	II/d						1				5.00
v8	II/c			1							5.00
9	II/b						1				5.00
10	II/a										
Jumlah ASN		4	13	1			2			20	100.00
% ASN		20.00	65.00	5.00			10.00			100.00	
Non ASN			2				3	1		6	
Jumlah ASN + Non ASN		4	15	1			5	1		26	
% ASN + Non ASN		15.38	57.69	3.85			19.23	3.85		100.00	

Tabel 2.3
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a.	Eselon II.b	1	Kepala Badan
b.	Eselon III.a	1	Sekretaris
c.	Eselon III.b	3	Kabid
d.	Eselon IV.a	9	Jabatan Fungsioanal
e.	Staf	6	PNS
f.	Staf	6	(Non ASN)
	Jumlah	26	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

Rekap PNS/Non PNS per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan											
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS					PENDIDIKAN			
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR	Jumlah	S1	D3	SMA	SMP /SD
1	SEKRETARIAT	orang	1	2	5	1	9	3	1	4	1
2	BIDANG I	orang			1		1	1			
3	BIDANG II	orang			1		1			1	
4	BIDANG III	orang			1		1	1			
Total ASN dan Non ASN			1	2	8	1	12	5	1	5	1
% ASN dan Non ASN			8.33	16.67	66.67	8.33	100.00	41.67	8.33	41.67	8.33

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang ada saat ini diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jombang dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan

SLTP/SD sebesar 0%,SLTA sebesar 10.%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 90%, untukpegawai Non ASN 66.67% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD dan 33.33% berlatar belakang S1, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing uni torganisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang per Oktober 2022 adalah sebagai berikut: Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	JENIS BARANG	LUAS (m2)	TH.PENG ADAAN	LETAK/ALA MAT	STATUS TANAH	PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA/ NILAI	KET
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.III	493	2012	Jl. Urip Sumoharjo 47	Hak Pakai	Bakesbang	Pembelian	492.600	
2	Tanah Bangunan Kantor Permanen		1997	Jl.Gatot Subroto		Gedung Juang	Pembelian	2.231.250	
	Jumlah							2.723.850	

Tabel: 2.6
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	HARGA	KET.
A	ALAT-ALAT ANGKUT						
1	MOBIL	1	INNOVA	2010	BAIK	217.700.000	
2	MOBIL	1	SUZUKI AVP	2013	BAIK	158.785.000	
3	PICK UP	1	TOYOTA	1996	BAIK	23.000.000	
4	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	2001	BAIK	9.250.000	
5	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	1994	BAIK	750.000	
6	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	1997	BAIK	825.000	
7	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	1997	BAIK	825.000	
8	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	2005	BAIK	9.250.000	
9	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/MCB	2005	BAIK	925.000	
10	SEPEDA MOTOR	1	SUPRA X/NF 125 TD2008	2008	BAIK	12.171.000	
11	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/SUPRA X 125 TD	2013	BAIK	14.207.500	
12	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/SUPRA X 125 TD	2013	BAIK	14.207.500	
13	SEPEDA MOTOR	1	HONDA AFX12021C08M/T	2015	BAIK	16.266.000	
14	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/NEW SUPRA SPOKE F1	2016	BAIK	15.618.000	
15	SEPEDA MOTOR	1	HONDA/NEW SUPRA SPOKE F1	2016	BAIK	15.618.000	
	JUMLAH	15				509.398.000	

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

NO	KONDISI	LETAK LOKASI /ALAMAT	LUAS (m2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.
1	BANGUNAN GEDUNG TERTUTUP PERMANEN	JL.URIP SUMAHARJO	30	HAK PAKAI	APBD	21.555.150	
2	BANGUNAN GEDUNG PERMANEN	JL.GATOT SUBROTO	670,7	HAK PAKAI	APBD	418.516.800	
3	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN-LAIN	JL.URIP SUMOHARJO	200	HAK PAKAI	APBD	50.000.000	
4	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN-LAIN	JL.URIP SUMOHARJO	60	HAK PAKAI	APBD	32.997.700	
5	RUMAH NEGARA GOL.III TIPE B PERMANEN	JL.URIP SUMOHARJO	290	HAK PAKAI	APBD	870.497.800	
	JUMLAH					1.393.567.450	

KIB D (INSTALASI)

NO	NAMA BARANG	LETAK LOKASI /ALAMAT	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA	KET.
1	INSTALASI GARDIU LISTRIK DISTRIBUSI KECEPATAN SEDANG	JL.URIP SUMAHARJO	HAK PAKAI	APBD	48.003.100	
JUMLAH					48.003.100	

Tabel: 2.7

Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin

NO URUT	GOLO NGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
	02	PERALATAN DAN MESIN			
3		02.06.01.01.03	MESIN TIK MAN LONG		1
4		02.06.0104.01	ALMARI BESI		9
5		02.06.01.04.02	RAK BESI		5
6		02.06.01.04.04	FILLING BESI		8
7		02.06.01.05.01	PAPAN VISUAL		1
8		02.06.01.05.05	ALAT PENGHANCUR KERTAS		1
9		02.06.01.05.07	PAPAN PENGUMUMAN		2
10		02.06.01.05.10	WHITE BOARD		3
11		02.06.02.01.01	LEMARI KAYU		4
12		02.06.02.01.02	RAK KAYU		8
13		02.06.02.01.11	MEJA TULIS		5
14		02.06.02.01.13	MEJA TELEPHONE		1
15		02.06.02.01.19	MEJA PANJANG		14
16		02.06.02.01.28	KURSI TAMU		2
17		02.06.02.01.29	KURSI TANGAN		6
18		02.06.02.01.30	KURSI PUTAR		4
19		02.06.02.01.31	KURSI BIASA		16
20		02.06.02.01.34	KURSI LIPAT		11
21		02.06.02.03.01	M. PENGHISAP DEBU		1
22		02.06.02.04.03	AC WINDOW		5
23		02.06.02.04.04	AC SPLIT		7
24		02.06.02.06.08	SOUND SYSTEM		1
25		02.06.02.06.12	WARELESS		1
26		02.06.02.06.49	HANDYCAM		1
27		02.06.03.02.01	PC UNIT		8
28		02.06.03.02.03	NOTEBOOK		4
29		02.06.03.05.03	PRINTER		25
30		02.06.04.01.04	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON II		1
32		02.06.04.01.05	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON III		4
33		02.06.04.01.06	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON IV		4
34		02.06.04.01.09	MEJA KERJA PEJABAT		1
35		02.06.04.03.04	KURSI KERJA PEJABAT		2

NO URUT	GOLO NGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
			ESSELON II		
36		02.06.04.03.05	KURSI KERJA PEJABAT ESSELON III		1
37		02.06.04.03.09	KURSI KERJA PEJABAT		1
38		02.07.01.01.01	KAMERA+ATTACHMENT		2
39		02.07.01.01.03	PROYEKTOR+ATTACHMENT		1
40		04.03.06.02.02	INSTALASI GERDU LISTRIK		1
42		02.07.02.01.20	FACSIMILE		2
43		02.07.02.02.05	RIX		1
44		02.06.02.64.07	EXHAUST FAN		6
45		02.06.03.02.02	LAPTOP		8
46		02.09.01.46.04	ALAT PEMADAM KEBAKARAN		3

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Hasil Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan banga dan Politik

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang pada periode sebelumnya (2019-2020), (2021-2023) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran. Dimana hasil kinerja ini kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan 1(satu) tahun mendatang (2024) sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Hasil Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan banga dan Politik

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Targ et NSP K	Targ et ikk	Target indikat or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Angka Kriminalitas		□		4,09	4,06	N/A	N/A	N/A	4,88	4,34	N/A	N/A	N/A	80,7	93,1	N/A	N/A	N/A
2	Prosentase penanganan konflik sosial				46,67	48	N/A	N/A	N/A	47,05	48,39	N/A	N/A	N/A	99,2	99,19	N/A	N/A	N/A
3	Prosentase menurunnya konflik sosial				96,67	96,55	N/A	N/A	N/A	94,12	93,75	N/A	N/A	N/A	102,6	102,9	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial yang tersusun				3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah anggota FKDM yang terfasilitasi				110	110	N/A	N/A	N/A	110	110	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah potensi konflik atau gangguan yang tertangani				32	30	N/A	N/A	N/A	32	30	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
7	Jumlah peserta sosialisasi /penyuluhan gangguan masyarakat				1.777	375	N/A	N/A	N/A	2677	375	N/A	N/A	N/A	150,6	100	N/A	N/A	N/A
8	Tidak terjadi konflik SARA		□		100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
9	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu				71	0	N/A	N/A	N/A	83,58	0	N/A	N/A	N/A	118,6	0	N/A	N/A	N/A
10	Prosentase				50	53,9	N/A	N/A	N/A	50,5	57,6	N/A	N/A	N/A	101,	106,	N/A	N/A	N/A

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Orkesmas ,Orpol dan LSM yang aktif					3				7	7			A	1	9			A
11	Prosentase pembinaan orkesmas,orprof,orpol dan LSM yang aktif				0	36,88	N/A	N/A	N/A	0	40,82	N/A	N/A	N/A	0	110,7	N/A	N/A	N/A
12	Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya				0,19	0	N/A	N/A	N/A	0,2	0	N/A	N/A	N/A	105,3	0	N/A	N/A	N/A
13	Penyuluhan kepada organisasi sosial politik dan masyarakat				400	100	N/A	N/A	N/A	550	100	N/A	N/A	N/A	137,5	100	N/A	N/A	N/A
16	Fasilitasi hubungan antar lembaga				1	2	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
17	Tidak terjadi konflik kelompok				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
18	Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan				66	67	N/A	N/A	N/A	66,2	67,07	N/A	N/A	N/A	100,3	100,1	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah peserta penyuluha wawasan kebangsaan dan bela negara				725	150	N/A	N/A	N/A	630	150	N/A	N/A	N/A	86,9	100	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah anggota FKUB dan FPK				300	150	N/A	N/A	N/A	300	150	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah peserta sosialisasi dan HAM				300	80	N/A	N/A	N/A	300	80	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
22	Prosentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang tertangani		□		N/A	N/A	62,2 2	65	71	N/A	N/A	63,0 4	67,4	0	N/A	N/A	101,32	103,69	0
23	Prosentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
24	Prosentase peningkatan pemahaman peserta di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				N/A	N/A	1,04	2,04	3,05	N/A	N/A	0,98	4,91	0	N/A	N/A	94,231	240,69	0
25	% rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
26	% pemahaman peserta bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				N/A	N/A	70	75	80	N/A	N/A	68,88	75,09	0	N/A	N/A	98,4	100,12	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
27	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5	0	N/A	N/A	100	100	0
28	Rumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	0	N/A	N/A	100	100	0
29	Jumlah kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan dilaksanakan				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
30	Jumlah kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang dikordinasikn				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0
31	Jumlah laporan monev bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0
32	% rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
33	% peningkatan pemahaman peserta Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial				N/A	N/A	1,04	2,04	3,04	N/A	N/A	1,06	4,67	0	N/A	N/A	101,92	228,92	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	dan Budaya																		
34	% rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
35	% pemahaman peserta Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya				N/A	N/A	70	75	80	N/A	N/A	68,1 4	75	0	N/A	N/A	97,3 43	100	0
36	Jumlah Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
37	Jumlah Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	0	N/A	N/A	100	100	0
38	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	3	3	0	N/A	N/A	100	100	0
39	Jumlah Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah																		
40	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0
41	% rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
42	% peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				N/A	N/A	10	10	10	N/A	N/A	10	10,17	0	N/A	N/A	100	101,7	0
43	% rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
44	% pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				N/A	N/A	70	75	80	N/A	N/A	76,34	80,57	0	N/A	N/A	109,06	107,43	0
45	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	3	0	N/A	N/A	100	18,75	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
46	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	5	0	N/A	N/A	100	31,25	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
47	Jumlah kebijakan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	13	0	N/A	N/A	100	81,25	0
48	Jumlah kegiatan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				N/A	N/A	16	100	100	N/A	N/A	16	18	0	N/A	N/A	100	18	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	yang dikoordinasikan																		
49	Jumlah laporan monev bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	4	0	N/A	N/A	100	25	0
50	% rumusan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
51	% peningkatan pemahaman peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				N/A	N/A	10	10	10	N/A	N/A	10,6 5	10,1 2	0	N/A	N/A	106, 5	101, 2	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
52	% rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
53	% pemahaman peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				N/A	N/A	70	75	80	N/A	N/A	76,34	86,46	0	N/A	N/A	109,06	115,28	0
54	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	6	0	N/A	N/A	100	37,5	0
55	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	3	0	N/A	N/A	100	18,75	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
56	Jumlah kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang dilaksanakan				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	75	0	N/A	N/A	100	468,75	0
57	Jumlah laporan monev bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				N/A	N/A	16	16	16	N/A	N/A	16	4	0	N/A	N/A	100	25	0
58	% rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
59	% peningkatan pemahaman peserta Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan				N/A	N/A	10	10	10	N/A	N/A	10,65	10,3	0	N/A	N/A	106,5	103	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Targ et NSP K	Targ et ikk	Target indikat or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																		
60	Jumlah potensi konflik yang tertangani				N/A	N/A	28	26	24	N/A	N/A	22	29	0	N/A	N/A	78,5 71	111, 54	0
61	% rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
62	% pemahaman peserta dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				N/A	N/A	63	70	75	N/A	N/A	68	80	0	N/A	N/A	107, 94	114, 29	0
63	jumlah potensi konflik yang terdeteksi				N/A	N/A	50	50	50	N/A	N/A	50	65	0	N/A	N/A	100	130	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
64	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang tersusun				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5	0	N/A	N/A	100	100	0
65	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang tersusun				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
66	Jumlah kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanaman konflik di daerah yang dilaksanakan				N/A	N/A	216	216	216	N/A	N/A	170	329	0	N/A	N/A	78,70 ₄	152,3 ₁	0
67	Jumlah kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanaman konflik di daerah yang dikoordinasikan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
68	Jumlah laporan monev bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0
69	Jumlah rakor forpimda yang dilaksanakan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0
70	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur		ü		N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
71	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
72	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun				N/A	N/A	2	2	2	N/A	N/A	9	2	0	N/A	N/A	450	100	0
73	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	27	27	0	N/A	N/A	540	540	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	tersusun																		
74	Prosentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
75	Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
76	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Badan Kestuan Bangsa dan Politik yang difasilitasi				N/A	N/A	14	14	14	N/A	N/A	14	12	0	N/A	N/A	100	85,71 ₄	0
77	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	0	12	12	N/A	N/A	0	12	0	N/A	N/A	0	100	0
78	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun				N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	0	1	0	N/A	N/A	0	100	0
79	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun				N/A	N/A	17	17	17	N/A	N/A	17	17	0	N/A	N/A	100	100	0
80	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	perkantoran																		
81	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	100	100	0
82	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	2	2	2	N/A	N/A	2	0	0	N/A	N/A	100	0	0
83	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	N/A	29	29	29	N/A	N/A	29	26	0	N/A	N/A	100	89,65 5	0
84	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	N/A	190 0	190 0	190 0	N/A	N/A	218 87	122 4	0	N/A	N/A	1151, 9	64,42 1	0
85	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	N/A	334 00	334 00	334 00	N/A	N/A	379 66	248 50	0	N/A	N/A	113,6 7	74,40 1	0
86	Jumlah pemenuhan bahan bacaan				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	0	N/A	N/A	100	100	0
87	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	N/A	89	93	95	N/A	N/A	89	90	0	N/A	N/A	100	96,77 4	0
88	prosentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
89	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan				N/A	N/A	0	5	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
90	Jumlah Pengadaan mebel				N/A	N/A	0	1	0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
91	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				N/A	N/A	0	4	2	N/A	N/A	5	3	0	N/A	N/A	0	75	0
92	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
93	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				N/A	N/A	29	29	29	N/A	N/A	29	20	0	N/A	N/A	100	68,96 6	0
94	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
95	jumlah penyediaan jasa surat menyurat				N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	0	1	0	N/A	N/A	0	100	0
96	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	0	N/A	N/A	100	100	0
97	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan				N/A	N/A	5	0	0	N/A	N/A	5	0	0	N/A	N/A	100	0	0

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSP K	Target ikk	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
98	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	0	N/A	N/A	100	100	0
99	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	N/A	2	4	4	N/A	N/A	3	15	0	N/A	N/A	150	375	0
100	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya				N/A	N/A	18	23	23	N/A	N/A	12	15	0	N/A	N/A	66,66 ₇	65,21 ₇	0
101	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				N/A	N/A	2	2	2	N/A	N/A	25	39	0	N/A	N/A	1250	1950	0
102	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Bakesbangpol yang dipelihara				N/A	N/A	0	1	1	N/A	N/A	0	2	0	N/A	N/A	0	200	0

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Reformasi birokrasi adalah paradigma pembangunan baru yang salah satu agendanya juga meliputi reformasi keuangan. Sebelumnya penganggaran yang dilakukan adalah berbasis dari input kemudian sekarang diarahkan sesuai dengan kinerja. Salah satu dampaknya adalah poin yang diutamakan dalam proses penganggaran ini adalah hasil kerja (*output*) dan dampak (*outcome*), selain itu juga harus ada keterkaitan yang jelas antara sasaran dan program serta penanggung jawab yang pasti dari pelaksanaan program tersebut. Pada bagian ini akan direview mengenai anggaran yang telah direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang beserta realisasi anggaran tersebut hingga tahun 2022.

Realisasi anggaran APBD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang akan dipaparkan melalui table 2.9 anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

Tabel 2.9 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572.499.500	410.467.500	-	-	-	527.644.237	378.161.376	-	-	-	92 %	92 %	0%	0%	0 %	-28%	-28%
2	Kegiatan :penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	572.499.500	410.467.500	-	-	-	527.644.237	378.161.376	-	-	-	92 %	92 %	0%	0%	0 %	-28%	-28%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	238.760.000	95.808.000	-	-	-	210.585.315	80.659.160	-	-	-	88 %	84 %	0%	0%	0 %	-60%	-62%
4	Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	42.500.000	26.330.000	-	-	-	42.122.140	26.329.360	-	-	-	99 %	100 %	0%	0%	0 %	-38%	-37%
5	Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang /berat gedung kantor /bangunan pendukungnya	115.260.000	19.128.000	-	-	-	114.807.100	19.127.500	-	-	-	100 %	100 %	0%	0%	0 %	-83%	-83%
6	Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang /berat sarana dan prasarana gedung kantor	30.000.000	18.500.000	-	-	-	7.871.500	6.475.000	-	-	-	26 %	35 %	0%	0%	0 %	-38%	-18%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
7	Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang /berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	39.000.000	31.850.000	-	-	-	34.584.575	28.727.300	-	-	-	89 %	90 %	0%	0%	0 %	-18%	-17%
8	Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12.000.000	-	-	-	-	11.200.000	-	-	-	-	93 %	0%	0%	0%	0 %	0%	0%
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.555.000	37.843.700	-	-	-	34.745.600	29.505.800	-	-	-	93 %	78 %	0%	0%	0 %	1%	-15%
10	Penyusunan rencana strategis OPD	-	5.000.000	-	-	-	-	4.960.000	-	-	-	0%	99 %	0%	0%	0 %	0%	0%
11	Penyusunan rencana kerja OPD	20.055.000	17.215.000	-	-	-	17.988.600	13.148.400	-	-	-	90 %	76 %	0%	0%	0 %	-14%	-27%
12	Penyusunan laporan capaian kinerja OPD	10.500.000	6.816.000	-	-	-	10.070.000	5.137.200	-	-	-	96 %	75 %	0%	0%	0 %	-35%	-49%
13	Penyusunan laporan keuangan OPD	7.000.000	8.812.700	-	-	-	6.687.000	6.260.200	-	-	-	96 %	71 %	0%	0%	0 %	26%	-6%
14	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik	2.035.467.000	1.237.621.300	-	-	-	1.926.649.600	1.211.064.600	-	-	-	95 %	98 %	0%	0%	0 %	-39%	-37%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
15	Kegiatan : Penanganan Konflik	1.496.608.000	1.157.863.800	-	-	-	1.444.097.400	1.131.307.100	-	-	-	96 %	98 %	0%	0%	0 %	-23%	-22%
16	Kegiatan : Pencegahan Konflik	538.859.000	79.757.500	-	-	-	482.552.200	79.757.500	-	-	-	90 %	100 %	0%	0%	0 %	-85%	-83%
17	Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan	622.595.000	150.096.000	-	-	-	410.928.815	146.566.000	-	-	-	66 %	98 %	0%	0%	0 %	-76%	-64%
18	Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penanganan kasus SARA	249.876.000	96.075.000	-	-	-	144.195.500	92.571.000	-	-	-	58 %	96 %	0%	0%	0 %	-62%	-36%
19	Kegiatan : Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	277.719.000	41.581.000	-	-	-	208.232.796	41.555.000	-	-	-	75 %	100 %	0%	0%	0 %	-85%	-80%
20	Kegiatan : Sosialisasi Hak Asasi Manusia	95.000.000	12.440.000	-	-	-	58.500.519	12.440.000	-	-	-	62 %	100 %	0%	0%	0 %	-87%	-79%
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	386.680.000	107.361.300	-	-	-	341.115.500	101.553.950	-	-	-	88 %	95 %	0%	0%	0 %	-72%	-70%
22	Kegiatan : Fasilitasi hubungan antar lembaga	281680000	44578300	-	-	-	247524000	40077050	-	-	-	88 %	90 %	0%	0%	0 %	-84%	-84%
23	Kegiatan : Penyuluhan kepada organisasi sosial politik	105000000	62783000	-	-	-	93591500	61476900	-	-	-	89 %	98 %	0%	0%	0 %	-40%	-34%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	dan masyarakat																	
24	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	139.935.700	175.350.000	219.100.000	-	-	143.341.600	205.738.000	-	0%	0%	102%	117%	0%	57%	44%
25	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-	-	139.935.700	175.350.000	219.100.000	-	-	143.341.600	205.738.000	-	0%	0%	102%	117%	0%	57%	44%
26	Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	-	-	2.480.800	3.100.000	3.900.000	-	-	1.940.800	0	-	0%	0%	78%	0%	0%	57%	-100%
27	Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan,	-	-	1.240.000	1.550.000	2.000.000	-	-	1.240.800	0	-	0%	0%	100%	0%	0%	61%	-100%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan																	
28	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	-	-	45.525.300	57.000.000	71.200.000	-	-	30.424.000	26.348.000	-	0%	0%	67%	46%	0%	56%	-13%
29	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	-	-	89.333.000	112.000.000	140.000.000	-	-	109.586.000	179.390.000	-	0%	0%	123%	160%	0%	57%	64%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
30	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	-	-	1.356.600	1.700.000	2.000.000	-	-	150.000	0	-	0%	0%	11%	0%	0%	47%	-100%
31	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	-	-	151.749.000	190.320.000	194.200.000	-	-	213.586.900	197.977.400	-	0%	0%	141%	104%	0%	28%	-7%
32	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	-	-	151.749.000	190.320.000	194.200.000	-	-	213.586.900	197.977.400	-	0%	0%	141%	104%	0%	28%	-7%
33	Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi	-	-	2.480.800	3.100.000	3.500.000	-	-	2.360.800	500.000	-	0%	0%	95%	16%	0%	41%	-79%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah																	
34	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	-	-	1.240.800	1.520.000	1.700.000	-	-	1.240.800	0	-	0%	0%	100%	0%	0%	37%	-100%
35	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi	-	-	46.397.300	58.000.000	59.000.000	-	-	118.296.800	40.147.900	-	0%	0%	255%	69%	0%	27%	-66%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah																	
36	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	-	-	100.273.500	126.000.000	128.000.000	-	-	91.338.500	157.329.500	-	0%	0%	91%	125%	0%	28%	72%
37	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	-	-	1.356.600	1.700.000	2.000.000	-	-	350.000	0	-	0%	0%	26%	0%	0%	47%	-100%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	kepercayaan di daerah																	
38	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	481.292.200	4.823.500.000	4.878.000.000	-	-	3.590.825.650	6.686.145.700	-	0%	0%	746%	139%	0%	914%	86%
39	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	-	-				-	-	3.590.825.650	6.686.145.700	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																	
40	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	8.506.300	9.000.000	11.000.000	-	-	8.488.800	1.019.700	-	0%	0%	100%	11%	0%	29%	-88%
41	Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	-	-	2.032.487.550	2.035.000.000	2.037.000.000	-	-	2.015.204.650	4.305.170.000	-	0%	0%	99%	212%	0%	0%	114%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																	
42	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	2.693.191.350	2.700.000.000	2.750.000.000	-	-	1.512.514.700	2.378.250.900	-	0%	0%	56%	88%	0%	2%	57%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
43	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	27.190.000	27.500.000	28.000.000	-	-	22.805.800	1.705.100	-	0%	0%	84%	6%	0%	3%	-93%
44	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	-	-	51.557.000	52.000.000	52.000.000	-	-	31.811.700	0	-	0%	0%	62%	0%	0%	1%	-100%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
45	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	3.591.10.150	674.738.000	694.819.000	-	-	2.038.368.200	7.365.402.500	-	0%	0%	57%	1092%	0%	-81%	261%
46	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-	-	3.591.10.150	674.738.000	694.819.000	-	-	2.038.368.200	7.365.402.500	-	0%	0%	57%	1092%	0%	-81%	261%
47	Penyusunan Program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	-	-	11.589.400	11.938.000	12.295.000	-	-	6.713.300	1.350.000	-	0%	0%	58%	11%	0%	6%	-80%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Ormas Asing di Daerah																	
48	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	1.743.769.000	100.000.000	103.000.000	-	-	53.023.000	14.902.700	-	0%	0%	3%	15%	0%	-94%	-72%
49	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	1.771.658.350	496.700.000	511.558.000	-	-	1.957.514.100	7.342.977.500	-	0%	0%	110%	1478%	0%	-71%	275%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
50	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	64.093.400	66.100.000	67.966.000	-	-	21.117.800	6.172.300	-	0%	0%	33%	9%	0%	6%	-71%
51	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-	-	1.208.307.500	1.208.311.000	1.244.540.000	-	-	916.287.200	827.918.900	-	0%	0%	76%	69%	0%	3%	-10%
52	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	1.208.307.500	1.208.311.000	1.244.540.000	-	-	916.287.200	827.918.900	-	0%	0%	76%	69%	0%	3%	-10%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
53	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	-	-	475.000	475.000	475.000	-	-	475.000	800.000	-	0%	0%	100%	168%	0%	0%	68%
54	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	-	-	290.790.000	290.790.000	299.513.000	-	-	148.432.000	109.396.400	-	0%	0%	51%	38%	0%	3%	-26%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.																	
55	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah	-	-	422.052.500	422.053.000	434.714.000	-	-	369.308.400	437.731.600	-	0%	0%	88%	104%	0%	3%	19%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
56	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	-	-	46.217.500	46.220.000	47.604.000	-	-	46.848.500	35.078.000	-	0%	0%	101%	76%	0%	3%	-25%
57	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,	-	-	34.582.500	34.583.000	35.619.000	-	-	16.570.500	8.800.900	-	0%	0%	48%	25%	0%	3%	-47%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah																	
58	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kot a	-	-	414.190.000	414.190.000	426.615.000	-	-	334.652.800	236.112.000	-	0%	0%	81%	57%	0%	3%	-29%
59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	-	-	3.828.652.350	3.998.492.000	4.323.262.000	-	-	3.415.044.517	3.695.304.877	-	0%	0%	89%	92%	0%	13%	8%
60	Perencanaan,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	37.905.000	57.800.000	63.000.000	-	-	29.181.000	2.497.400	-	0%	0%	77%	4%	0%	66%	-91%
61	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	24.915.000	32.800.000	33.000.000	-	-	21.026.200	2.120.000	-	0%	0%	84%	6%	0%	32%	-90%
62	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	-	-	12.990.000	25.000.000	30.000.000	-	-	8.154.800	377.400	-	0%	0%	63%	2%	0%	131%	-95%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	realisasi kinerja SKPD																	
63	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.297.179.850	3.473.074.000	3.658.962.000	-	-	2.866.940.632	3.247.926.692	-	0%	0%	87%	94%	0%	11%	13%
64	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	3.285.554.850	3.455.387.000	3.643.962.000	-	-	2.858.363.432	2.996.481.191	-	0%	0%	87%	87%	0%	11%	5%
65	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	242.106.000	256.650.000	-	-	-	250.583.901	-	0%	0%	0%	104%	0%	0%	0%
66	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	-	-	-	4.187.000	8.000.000	-	-	-	426.000	-	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%
67	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	-	-	11.625.000	13.500.000	7.000.000	-	-	8.577.200	435.600	-	0%	0%	74%	3%	0%	-40%	-95%
68	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	136.934.300	143.868.000	153.000.000	-	-	127.764.909	145.393.301	-	0%	0%	93%	101%	0%	12%	14%
69	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	-	-	2.557.400	2.700.000	3.000.000	-	-	2.502.000	2.701.400	-	0%	0%	98%	100%	0%	17%	8%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	kantor																	
70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	24.639.700	25.900.000	27.000.000	-	-	24.330.025	20.246.600	-	0%	0%	99%	78%	0%	10%	-17%
71	Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	70.177.500	73.700.000	78.500.000	-	-	63.683.900	32.502.100	-	0%	0%	91%	44%	0%	12%	-49%
72	Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan	-	-	21.399.700	22.500.000	24.000.000	-	-	21.430.000	16.636.300	-	0%	0%	100%	74%	0%	12%	-22%
73	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	3.600.000	3.780.000	4.000.000	-	-	2.700.000	2.220.000	-	0%	0%	75%	59%	0%	11%	-18%
74	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	14.560.000	15.288.000	16.500.000	-	-	13.118.984	71.086.901	-	0%	0%	90%	465%	0%	13%	442%
75	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	-	-	-	185.500.000	200.000.000	-	-	29.406.000	20.523.000	-	0%	0%	0%	11%	0%	0%	-30%
76	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	-	-	-	140.000.000		-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
77	Pengadaan	-	-	-	10.500.		-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0	0%	0%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	mebel				000											%		
78	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	35.000.000	200.000.000	-	-	29.406.000	20.523.000	-	0%	0%	0%	59%	0%	0%	-30%
79	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-	-	2.791.400	-	0%	0%	0%	56%	0%	0%	0%
80	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	5.207.027	-	0%	0%	0%	87%	0%	0%	0%
81	Pendataan dan Pengadministrasian Kepegawaian	-	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-	-	90.000	-	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%
82	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	274.977.200	47.200.000	51.000.000	-	-	282.243.618	42.589.054	-	0%	0%	103%	90%	0%	-81%	-85%
83	Penyediaan Jasa surat penyurat	-	-		1.000.000	1.500.000	-	-	-	250.000	-	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%
84	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	-	-	44.400.000	46.200.000	49.500.000	-	-	38.265.618	42.339.054	-	0%	0%	86%	92%	0%	11%	11%
85	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	230.577.200	-	-	-	-	243.978.000	0	-	0%	0%	106%	0%	0%	0%	-100%

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
86	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	81.656.000	86.050.000	191.300.000	-	-	79.508.358	233.584.030	-	0%	0%	97%	271%	0%	134%	194%
87	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perinaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-	-	59.556.000	62.550.000	66.300.000	-	-	63.869.358	28.364.100	-	0%	0%	107%	45%	0%	11%	-56%
88	Pemeliharaan/R rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	22.100.000	23.500.000	25.000.000	-	-	15.639.000	15.945.000	-	0%	0%	71%	68%	0%	13%	2%
89	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	0	100.000.000	100.000.000	-	-	0	189.274.930	-	0%	0%	0%	189%	0%	0%	0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari selisih penganggaran dan realisasi yang hanya sedikit. Sedangkan rasio capaian antara realisasi dan penganggaran rata-rata diatas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat terealisasi 100%. secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kegiatan dapat dijalankan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang Sesuai tugas pokok dan fungsi, layanan yang diberikan berupa urusan Pemerintahan Umum yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi :

- ✓ Pengembangan wawasan kebangsaan, penciptaan stabilitas politik
- ✓ penanganan konflik dan deteksi dini, serta
- ✓ fasilitasi penanganan pencegahan narkoba di daerah

Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang bersifat tidak langsung. Layanan yang diberikan berupa kajian-kajian teknis, rekomendasi, sosialisasi/penyuluhan/pembinaan dan penggalangan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi urusan yang telah diamanahkan, tugas-tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dilakukan melalui bidang-bidang yang ada.

Layanan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang yaitu:

Layanan Internal

1. Menyusun program kerja Badan
2. Pelaksanaan Inventarisasi pengelolaan, penyajian dan data
3. Pememliharaan data
4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program
5. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran
6. Pelaksanaan Verifikasi anggaran
7. Penyusunann pertanggungjawaban anggaran
8. Pengelolaan kearsipan
9. Penyelenggaraan kerumah tanggapan
10. Pengelolaaan data kepegawaian

Layanan Eksternal

1. Memberikan rekomendasi penelitian/survey kepada masyarakat/lembaga yang mengadakan penelitian/survey di Wilayah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap Organisasi Masyarakat (ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;
3. Fasilitasi kegiatan politik kepada masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu maupun lembaga terkait lainnya;
4. Melaksanakan tugas Intelijen Daerah;
5. Melestarikan, peningkatan pemahaman serta mempertahankan Ideologi bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat;
7. Fasilitasi Tim Pemantau perkembangan politik ;
8. Fasilitasi kerukunan warga masyarakat dan menghindari terjadinya SARA dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
9. Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
10. Fasilitasi deteksi dini permasalahan warga masyarakat dalam wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

11. Amanah dari Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352). dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, dan penguatan fungsi-fungsi pembauran kebangsaan.
12. Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/ Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.

2.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
2. Koordinasi dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
3. Koordinasi dan fasilitasi Puast Pendidikan wawasan kebangsaan Kabupaten Jombang
4. Koordinasi dan fasilitasi Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkotika di Kabupaten Jombang
5. Koordinasi dan fasilitasi tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan
6. Koordinasi dan fasilitasi tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik
7. Koordinasi dan fasilitasi tim pemantau perkembangan politik di Kabupaten Jombang
8. Koordinasi dan fasilitasi pusata komunikasi dan informasi kewaspadaan dini Pemerintah daerah
9. Koordinasi dan fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat
10. Koordinasi dan fasilitasi tim terpadu penanganan konflik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

3.1. Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menjalankan tugas Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jombang memiliki beberapa permasalahan yang tentunya menghambat kinerja. Adapun permasalahan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang diantaranya:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas dan kwanritas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi	Terbatasnya Anggaran, sarana dan prasarana	SOP penyelenggaraan pelayanan belum memadai.
2.	Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tupoksi	Belum ada sistem informasi yang dapat di akses oleh masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan
3.	Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional dalam berdemokrasi	Rendahnya Partisipasi Masyarakat	Kurangnya pendidikan politik kepada Masyarakat
			Kurangnya Sosialisasi Partisipasi Politik Masyarakat
4.	Belum tervalidasinya data mengenai keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM	Kurang terkendalinya keberadaan dan jumlah ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Jombang	Banyak bermunculan keberadaan ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Jombang
5	masih rendahnya cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan bela negara	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat daerah .	Toleransi dan nilai kebersamaan saling gotong royong serta nilai budaya yang hidup dimasyarakat mulai luntur dan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			hilang
6.	Masih rendahnya kualitas data pemantauan perkembangan situasi	Dinamika mobilitas masyarakat dan akses terhadap informasi yang tak terbatas menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan informasi sehingga sering menyebabkan konflik sosial di masyarakat	Kurangnya koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah

3.2. Penentuan Isu strategis

Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Badan Kesatuan bangsa dan politik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula, kaum perempuan dan disabilitas , baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat
2. Masih rendahnya pembinaan politik dan partisipasi oraganisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
3. Kurang optimalnya deteksi dini, pencegahan dini dan lapor dini
4. Belum optimalnya tingkat kerukunan antar umat beragama dan etnis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARSAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Bahwasanya Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan yang akan diwujudkan adalah *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.*

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Badan Kesatuan bangsa dan politik beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dana Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jombang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke		
				1	2	3
Mewujudkan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi		Jumlah Konflik IPOLEKSOSBUD	kasus	0	0	0
	Peningkatan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Jumlah konflik ideologi	kasus	0	0	0
		Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan	kasus	0	0	0
		Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya	kasus	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke		
				1	2	3
		Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	rekomendasi	15	15	15
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	Indeks	69	72	75
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah		A 80.00%	A 81.60%	A 83.23%

4.2 Cascading Kinerja

Penyusunan Renstra Perangkat harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah, dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Cascading Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 sesuai tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Bakesbangpol
Tahun 2024-2026

NAMA PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG
URUSAN YANG DIAMPU : PEMERINTAHAN UMU

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkatkan kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	Jumlah konflik IPOLEKSOSB UD	Mewujudkan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Jumlah konflik IPOLEKSOSB UD	Peningkatan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini , politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	1 Jumlah konflik ideologi	Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase etnis/suku di kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
									Persentase Kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila
							2 Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan
							3 Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya		Jumlah etnis/suku di kabupaten jombang yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
									Jumlah pemuda kader Kabupaten /Kota yang lolos seleksi sebagai

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Paskibraka
							4 Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	Sub Kegiatan : Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka Persentase partai politik yang melakukan kaderisasi Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan Persentase partai politik yang mendapatkan fasilitasi bantuan pendidikan politik

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Sub. Kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
								Program : Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								sosial dan Budaya	beragama
								Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan
									Persentase kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana
									Jumlah ASN yang mendapatkan tes narkoba
								Sub. Kegiatan Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
								Sub. Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
								Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan
									Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang
								Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja asing dan lembaga asing , kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur
								Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan
								Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD
								Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
									Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									tunjangan ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD
								Koordinasi dan penyusunana laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan administrasi kepegawaian Bakesbangpol
								Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
								Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kantor	kantor yang disediakan
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan
								Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
								Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
								Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
								Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	prosentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
								Pengadaan Mebeler	Jumlah Paket Mabel yang disediakan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik
								penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
								Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinasoperasional dan lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)				Renstra Perangkat daerah					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
								Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan yaitu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu.penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indicator sasaran yang ditetapkan

Dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada , strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 5.1

Sasaran, Indikator sasaran dan strategi

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	- Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara Kamtibmas - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas - Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tim kewaspadaan dini - Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat - Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
			bangsa, kesadaran bela Negara - Menyertakan elemen masyarakat dan generasi muda dalam seminar wawasan kebangsaan dan bela Negara - Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama/etnis dalam FKUB dan FPK - Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB/FPK - Mendukung pelaksanaan pemilu yang aman, langsung, umum, bebas rahasia - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan Daerah - Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis - Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap orkesmas, orprof, orpol dan LSM

5.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi menentukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Adapun kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Peningkatan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	- Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara Kamtibmas	- Menambah jaringan kerjasama dengan dalam pencegahan konflik dengan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Stakeholder lainnya
		- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui FKDM
		- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tim kewaspadaan dini	- Meningkatkan kemampuan intelijen oleh tim kewaspadaan dini
		- Memberikan pemahaman tentang kebangsaan kepada masyarakat	- Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan generasi muda melalui kegiatan ideologi pancasila dan wawasan

Tujuan RPD : Meningkatkan kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kebangsaan
		- Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran bela Negara	- Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholder dalam tema kebangsaan dan cinta tanah air
		- Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama/etnis dalam FKUB dan FPK	- Meningkatkan pembinaan FKUB/FPK, koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama/etnis dan masyarakat
		- Meningkatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah	- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 20 tahun 2020 serta Instruksi Bupati Kabupaten Jombang tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan

Tujuan RPD : Meningkatkan kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan peredaran gelap narkotika
		- Meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan FKUB/FPK	- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan FKUB dan FPK dalam perumusan kebijakan urusan agama dan adat
		- Mendukung pelaksanaan pemilu yang aman, langsung, umum, bebas rahasia	- Meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik - Meningkatkan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemilu
		- Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap orkesmas, orprof, orpol dan LSM	- Meningkatkan monitoring dan pemantauan Ormas dan LSM - Peningkatan validitas data ormas /LSM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya , maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keefektifitasan suatu program dan kegiatan baik kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk mewujudkan pada tahun yang bersangkutan , sedangkan pagu yang indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme OPD dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program

Program Prioritas yang menjadi urusan wajib/belanja langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang adalah urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdiri dari 6 (enam) program yang dijabarkan ke 11 (kegiatan) kegiatan

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerinath Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunana laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- d. Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - d. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan
 - d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dari 1 kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan Program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja

asing dan lembaga asing , kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah

d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, sasaran dan rencana pencapaian program dan kegiatan tersaji dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang
Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (SIGMAOUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
													Tahun -1 2024		Tahun -2 2025		Tahun -3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4						5	6	7	8	9								10	11		
Mewujudkan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Peningkatan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	1	Jumlah konflik ideologi	8	01	02			Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase etnis/suku di kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-	Persen	100	1.080.750.000	100	1.134.787.500	100	1.191.526.875	100	1.191.526.875	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang		
									Persentase Kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	-	Persen	100		100		100		100						
		2	Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan	8	01	02	2		Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan	100	Persen	100		100		100		100					
		3	Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya						Jumlah etnis/suku di kabupaten jombang yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-	suku/etnis	17		17		17		17						
									Jumlah pemuda kader Kabupaten /Kota yang lolos seleksi sebagai Paskibraka	-	orang	76		76		76		76						
		4	Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	8	01	02	2	01	Sub Kegiatan : Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	3	dokumen	6	52.250.000	6	54.862.500	6	57.605.625	6	57.605.625				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			8 1 3	0 1 3	0 3	2 0 1	0 1	Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10	dokumen	6	65.700.000	6	68.985.000	6	72.434.250	6	72.434.250
			8 1 3	0 1 3	0 3	2 0 3	0 3	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	orang	1,000	850.750.000	1,000	893.287.500	1,000	937.951.875	1,000	937.951.875
			8 1 3	0 1 3	0 3	2 0 5	0 5	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	laporan	4	275.000.000	4	288.750.000	4	303.187.500	4	303.187.500
			8 1 4	0 1 4	0 4	2		Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	-	Persen	5	530.050.000	5	556.552.500	5	584.380.125	15	584.380.125
			8 1 4	0 1 4	0 4	2		Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	100	Persen	100		100		100		100	

		8	0	0	2	0	Sub. Kegiatan Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3	dokumen	6	55.350.000	6	58.117.500	6	61.023.375	6	61.023.375	
		8	0	0	2	0	Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	orang	830	845.000.000	830	887.250.000	830	931.612.500	830	931.612.500	
		8	0	0	2	0	Sub. Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	laporan	4	125.500.000	4	131.775.000	4	138.363.750	12	138.363.750	
		8	0	0			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	-	laporan	3	1.499.200.000	3	1.574.160.000	3	1.648.675.875	3		
		8	0	0	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan	100	Persen	100		100		100		100		
								Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang	-	laporan	12		12		12		12		

			8	0	0	2	0	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5	dokumen	2	75.350.000	2	79.117.500	2	83.073.375	2	83.073.375		
			8	0	0	2	0	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	orang	1,408	799.000.000	1,408	838.950.000	1,408	880.897.500	1,408	880.897.500		
			8	0	0	2	0	5	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216	laporan	216	79.850.000	220	83.842.500	200	83.842.500	200	83.842.500		
			8	0	0	2	0	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	dokumen	12	545.000.000	12	572.250.000	12	600.862.500	12	600.862.500		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbang pol	8	0	0	1			Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	100	Persen	100	5.360.190.000	100	5.628.199.500	100	6.181.435.475	100	6.181.435.475		

	a Perang kat Daera h		8	0	0	2		Perencanaan, Pen anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	100	Persen	100	45.500.000	100	47.775.000	100	50.163.750	100	50.163.750
			8	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	dokumen	3	25.000.000	3	26.250.000	3	27.562.500	3	27.562.500
			8	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27	laporan	12	20.500.000	12	21.525.000	12	22.601.250	12	22.601.250
			8	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pencairian gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	Persen	100	4.166.990.000	100	4.375.339.500	100	4.579.720.850	100	4.579.720.000
									Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	Persen	100		100		100		100	
			8	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	22	Org/bln	21	3.870.000.000	21	4.063.500.000	21	4.266.675.000	21	4.266.675.000
			8	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12	dokumen	12	274.000.000	12	287.700.000	12	287.700.000	12	287.700.000
			8	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	dokumen	1	7.540.000	1	7.917.000	1	8.312.850	1	8.312.000
			8	0	0	2	0	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwula n/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Sem esteran SKPD	17	dokumen	17	15.450.000	17	16.222.500	17	17.033.000	17	17.033.000
			8	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan administrasi kepegawaian Bakesbangpol	Persen	-	100	17.500.000	100	19.500.000	100	23.450.000	100	23.450.000
			8	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	unit	-	2	17.500.000	2	19.500.000	2	23.450.000	2	60.450.000
			8	0	0	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	100	557.650.000	100	585.532.500	100	612.945.625	100	612.945.625
			8	0	0	2	0	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	6.500.000	1	6.825.000	1	7.166.500	1	7.166.500
			8	0	0	2	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Paket	4	35.500.000	4	37.275.000	4	37.275.000	4	37.275.000
			8	0	0	2	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Paket	2	85.350.000	2	89.617.500	2	94.098.375	2	94.098.375

			8	0	0	2	0	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	Paket	3	29.850.000	3	31.342.500	3	32.909.625	3	32.909.625
			8	0	0	2	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	dokumen	2	5.450.000	2	5.722.500	2	6.008.625	2	6.008.625
			8	0	0	2	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	93	laporan	4	395.000.000	4	414.750.000	4	435.487.500	12	435.487.500
			8	0	0	2		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	prosentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	100	130.800.000	100	137.340.000	100	144.207.000	100	144.207.000
			8	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4	unit	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.125.000	6	55.125.000
			8	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	paket	3	45.300.000	3	47.565.000	3	49.943.250	3	49.943.250
			8	0	0	2	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	unit	5	35.500.000	5	37.275.000	5	39.138.750	5	39.138.750
			8	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	100	Persen	100	36.750.000	100	38.587.500	100	40.516.000	100	40.516.000
			8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	36.750.000	12	38.587.500	12	40.516.000	12	40.516.000
			8	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	Persen	100	422.500.000	100	618.705.000	100	753.882.250	100	753.882.250
			8	0	0	2	0	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	unit	1	85.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000
			8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	unit	14	33.540.000	14	33.540.000	14	117.402.250	14	184.482.250
			8	0	0	2	0	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2	unit	2	212.480.000	2	312.480.000	2	352.480.000	2	352.480.000

		8	0	0	2	1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	39	unit	89	91.480.000	89	177.685.000	89	189.000.000	89	189.000.000		
--	--	---	---	---	---	---	--	--	----	------	----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, baik pencapaian terhadap indicator kinerja utama (IKU) maupun indikator hasil yang termuat dalam program program yang akan dilaksanakan. Target pencapaian kinerja sesuai indicator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pemerintah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			1	2	3	
1	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD	kasus	0	0	0	0
2	Jumlah konflik ideologi	kasus	0	0	0	0
3	Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan	kasus	0	0	0	0
4	Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya	kasus	0	0	0	0
5	Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	rekomendasi	15	15	15	15
6	Indeks Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	Indeks	69	72	75	75
7	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah		A 80.00%	A 81.60%	A 83.23%	A 83.23%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang disusun mendasari adanya Instruksi Menteri dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, diperlukan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dapat mewujudkan sinergitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat daerah/Provinsi maupun pusat . Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan maka Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2024 -2026 ini.

Jombang, 4 April 2023
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG



Drs. ANWAR, M.KP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710418 199201 1 004